

**PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMISARIS
INDEPENDEN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

*(Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2019-2022)*

(Skripsi)

Oleh
Muhammad Syihab Abdullah
1911031063



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022)

Oleh

Muhammad Syihab Abdullah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial antara ukuran dewan komisaris dan komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta penambahan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2022 digunakan sebagai populasi pada penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan analisis penelitian menggunakan *moderated regression analysis*, yang di mana terdapat total 72 sampel. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengujian secara parsial variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif sedangkan variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh. Pada uji moderasi profitabilitas didapatkan hasil bahwa variabel tersebut tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel ukuran dewan komisaris dan komisaris independen dengan variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata Kunci: Ukuran Dewan Komisaris; Komisaris Independen; Profitabilitas; Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE SIZE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND INDEPENDENT COMMISSIONERS ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE WITH PROFITABILITY AS A MODERATING VARIABLE (Study on Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2022 Period)

By

Muhammad Syihab Abdullah

This study aims to determine the partial effect between the size of the board of commissioners and independent commissioners on corporate social responsibility disclosure and the addition of profitability as a moderation variable. Mining companies listed on the IDX for the 2019-2022 period were used as the population in this study. The type of data used is secondary data while the method used in this study uses purposive sampling and research analysis using moderated regression analysis, in which there are a total of 72 samples. The results of the study found that partial testing of the size variable of the board of commissioners had a positive effect while the independent commissioner variable had no influence. In the profitability moderation test, it was found that the variable was unable to moderate the relationship between the size variable of the board of commissioners and independent commissioners with the variable of corporate social responsibility disclosure.

Keywords: Board of Commissioners size; Independent Commissioner; Profitability; Social Responsibility Disclosure.

**PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMISARIS
INDEPENDEN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

**(Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Periode 2019-2022)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**JURUSAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Syihab Abdullah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1911031063**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., C.A.

NIP. 197803092008122001

2. Ketua Jurusan

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.

NIP. 197008011995122000

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., C.A.

Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.

Penguji Kedua : Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Agustus 2024

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Lampung Selatan pada tanggal 12 September 2001 dengan nama lengkap Muhammad Syihab Abdullah yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abdullah Ali dan Ibu Hizriyah. Penulis memulai Pendidikan di RA Darussalam Natar pada tahun 2005, dan meneruskan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di MI Darussalam pada tahun 2007 – 2013. Kemudian penulis menyelesaikan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPQ Darul Fattah Bandar Lampung pada tahun 2013-2016, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAIT Darul Qur'an Mulia Gunung Sindur pada tahun 2016-2019.

Penulis kini terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung menjadi dalam organisasi ROIS dan Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) Fakultas Ekonomi Bisnis periode 2022.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syihab Abdullah

NPM : 1911031031

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”. adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dari sumbernya, dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 September 2024

Penulis,



Muhammad Syihab Abdullah
NPM. 1911031063

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilabbilamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulis skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Abdullah Ali dan Ibunda Hizriyah, terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa, terima kasih karena sudah selalu sabar memberikan semua kasih sayang, cinta, pengorbanan, perjuangan dan pelajaran hidup bagi Syihab. Hanya doa dan kasih sayang serta perjuangan yang bisa Syihab berikan kepada ayah dan Emak tercinta.

Kedua Kakakku tersayang Lu'lu ul A'la dan Syifaussalwa, yang selalu memberikan dukungan, doa serta semangat dalam proses keberhasilan Syihab untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk sahabat seperjuanganku, yang telah memberikan dukungan, dan motivasi tiada henti dalam susah maupun senang.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Isra: 7)

"Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui."

(Q.S Al-Ankabut: 64)

"Perhatikanlah shalat kalian.....perhatikanlah shalat kalian....."

**(Muhammad Shallallahu
'alaihi wasallam)**

“One Day Or Day One”

(The Rock)

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, do’a, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., C.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan nasihat, bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Si Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa;

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung;
8. Mba Sella dan Mas Doni selaku staff sekretariat S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini;
10. Ayahanda Abdullah Ali dan Emak Hizriyah, terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa, terima kasih karena sudah selalu sabar memberikan semua kasih sayang, cinta, pengorbanan, perjuangan dan pelajaran hidup bagi Syihab. Hanya doa dan kasih sayang serta perjuangan yang bisa Syihab berikan kepada ayah dan Emak tercinta.;
11. Kedua Kakakku tersayang Lu'lu ul A'la dan Syifaussalwa, yang selalu memberikan dukungan, doa serta semangat dalam proses keberhasilan Syihab untuk menyelesaikan skripsi ini.;
12. Amah terkasih Eni Muslihah (Mus) yang selalu menjadi penyemangat Ketika om;
13. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta nasihat yang telah kalian berikan kepadaku dalam masa pendidikan sarjana;
14. Jamaah Majelis Silaturrahim yang telah memberi motivasi, semangat dan nasihat kepada saya selama masa perkuliahan ini;
15. Jamaah Masjid Nurul Islam yang selalu memberi dorongan dan mengingatkan saya sehingga saya sangat termotivasi untuk menyelesaikan perkuliahan serta skripsi saya;
16. Jamaah Masjid Assalam yang telah banyak membantu, memotivasi dan banyak hal yang diberikan selama masa perkuliahan sampai proses skripsi ini. Semoga hal baik selalu mengiringi kalian;
17. Sahabat dan teman Seperjuangan kampusku yang telah banyak memberikan pengalaman, dukungan, motivasi, dan sudah berjuang bersama dari maba sampai saat ini, untuk Patoni, Fadel, dan Restu. Terimakasih telah banyak membantu, memotivasi dan banyak hal yang diberikan selama masa perkuliahan sampai proses skripsi ini. Semoga hal baik selalu mengiringi kalian, di manapun kalian berada nantinya;

18. Partner Syurga Roemah Sahabat Hamizan Ibu Dwi, Pak Herman, Mbah, Queen, Kak Raul, Kak Dola, Kak Atma, Alfath, Abshor, Riduwan, Amril, Qois, Syahroni, Luqman, Faruq, Rama, Akbar, Zarkasy, Huda, Dovaz, Rijal, Ravian. yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan dan nasihat selama masa perkuliahan sampai proses skripsi ini. Semoga Kita tidak hanya bertemu di satu atap dunia saja, tapi bisa bertemu dan berkumpul di atap syurganya.;
19. Sahabat yang luar biasa Mas Faqih, Ihsan, Jaka dan Ajro yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan dan nasihat selama masa perkuliahan sampai proses skripsi ini. Semoga Kita tidak hanya bertemu di satu atap dunia saja, tapi bisa bertemu dan berkumpul di atap syurganya.;
20. Keluarga SMP MuDa yang sangat luar biasa. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT;
21. Anak anak kelas Takhosus Lil Banin yang tercinta Fathir, Yunus, Isyam, Zikri, Jaky, Ghanim dan Atala. Terimakasih atas support yang diberikan, semoga Allah memudahkan kalian untuk terus berinterkasi dengan Al Quran, Sehingga harapannya kalian bisa membawa keluarga kalian dan Bapak untuk masuk syurganya Allah.
22. Alamamaterku tercinta Universitas Lampung;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian - penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, 30 September 2024

Penulis,

Muhammad Syihab Abdullah
NPM. 1911031063

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dari semua pihak, maka skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Bandar Lampung, 30 September 2024

Penulis,

Muhammad Syihab Abdullah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR)	11
2.1.2 Teori Stakeholder.....	13
2.1.3 Teori Agency	15
2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)	20
2.1.5 Profitabilitas.....	22
2.2 Pengembangan Hipotesis	25
2.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	25
2.2.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	25
2.2.3 Profitabilitas Mampu Memoderasi Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen Dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	26
2.3 Kerangka Penelitian	27
2.4 Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Populasi dan Sampel.....	30
3.3.1 Populasi.....	30
3.3.2 Sampel.....	30
3.3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.2 Operasional Variabel.....	31
3.3 Metode Analisis Data.....	33
3.3.1 Statistik Deskriptif	33
3.4 Uji Persyaratan Analisis Data	33
3.5 Metode Analisis Data.....	35

3.6	Uji Hipotesis	35
3.6.1	Uji Parsial (Uji T)	35
3.6.2	Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Hasil Analisis Data	37
4.1.1	Statistik Deskriptif	37
4.2	Uji Persyaratan Analisis Data	39
4.2.1	Uji Normalitas.....	39
4.2.2	Uji Multikolinieritas.....	40
4.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	41
4.2.4	Uji Autokolerasi.....	42
4.3	Uji Hipotesis	43
4.3.1	Uji T (Parsial)	43
4.3.2	Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	44
4.4	Pembahasan.....	45
4.4.1	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	45
4.4.2	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	46
4.4.3	Profitabilitas Mampu Memoderasi Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		49
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Keterbatasan penelitian	51
5.3	Saran	51
5.4	Implikasi	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Hasil Pemilihan Sampel.....	31
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	37
Tabel 4.2 Uji Kolmorov-Smirnov	39
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas.....	40
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	42
Tabel 4.5 Uji Parsial (T)	43
Tabel 4.6 Uji MRA UDK*DK.....	44
Tabel 4.7 Uji MRA UDK*KI	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik persebaran peringkat peserta pada PROPER 2021-2022.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	28
Gambar 4.1 Scatterplot.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate social responsibility (CSR) atau juga disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep dimana suatu perusahaan mengambil tanggung jawab atas segala aspek yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut, baik itu aspek sosial, lingkungan, ekonomi, konsumen atau *stakeholder* lainnya yang terlibat dalam aktivitas sebuah perusahaan. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) inilah yang menjadi isu utama dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukanlah sekedar kegiatan amal, melainkan CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup (Sitompul, 2021). Mengapa hal tersebut harus terlaksana, karena bisnis yang dapat beradaptasi dengan situasi di masa depan adalah bisnis yang dijalankan dengan bertanggung jawab secara sosial dan juga lingkungan hidup demi baiknya generasi di masa yang akan datang.

Seiring perkembangan industri zaman yang semakin moderen, banyak sekali kasus atau isu yang melatar belakangi terkait masalah lingkungan dan membuat perusahaan tidak hanya fokus untuk memaksimalkan keuntungan, tapi juga mengatasi masalah lingkungan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah semakin diakui oleh berbagai kalangan dalam konteks bisnis modern. Perusahaan tidak hanya diharapkan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas dan komitmen

mereka dalam CSR melalui berbagai cara, seperti laporan tahunan, publikasi, dan informasi lainnya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, sewajarnya Perusahaan memiliki sistem tata keelola Perusahaan (*Good corporate Governance*) yang baik. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) pengertian *Good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Upaya peningkatan kinerja dan nilai suatu perusahaan dapat dilihat melalui *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. GCG disini dproksikan sebagai dewan komisaris dan komisaris independen, yang dimana memiliki peran sebagai dewan pengawas atas jalannya aktivitas Perusahaan, peran GCG pula perlu ditingkatkan guna memperbaiki kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan yang akan dilampirkan pada laporan tahunan. Menurut Mohammadi et al (2021) yang meneliti hubungan ukuran dewan komisaris dengan *corporate social responsibility disclosure* mengatakan apabila di suatu Perusahaan memiliki kuantitas dewan komisaris yang cukup besar, maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja Perusahaan dalam mengawasi aktivitas Perusahaan yang harapannya dari itu, dapat lebih maksimal dalam pengungkapan tanggung jawab Perusahaan yang dilakukan. Begitu pula dengan adanya kehadiran komisaris independen, menurut Sunarsih & Nurhikmah (2017) dewan komisaris independen memiliki peranan yang cukup penting dalam sebuah Perusahaan yaitu untuk menepatkan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan lainnya sehingga dewan komisaris dapat berperilaku secara objektif dan dapat menaungi semua kepentingan *shareholder*.

Masalah atau kasus Lingkungan di Indonesia bisa dibilang cukup masif, baik itu dari kurangnya kesadaran masyarakat akan rusaknya lingkungan atau juga dari perusahaan yang kurang memerhatikan lingkungan sekitar dan hanya fokus terhadap apa yang didapat oleh perusahaan seperti laba. Kerusakan alam ini berupa polusi udara, polusi suara, dan juga mencemarkan ekosistem maupun lingkungan (Nanda & Rismayani, 2019). Industri pertambangan adalah

salah satu industri yang mendominasi dalam memberikan pengaruh atau dampak buruk terhadap lingkungan, hal ini disebabkan oleh kegiatan operasional industri pertambangan berhubungan langsung dengan lingkungan, mulai dari sumber bahan yang digunakan berasal dari alam sehingga dalam memperoleh bahan baku industri pertambangan harus berhubungan langsung dengan alam.

Sepanjang tahun 2020 JATAM mencatat terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektare lahan rusak. Namun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah tuduhan tersebut (Eben, 2021). Adapun klasifikasi konflik yang terjadi sepanjang tahun 2020 itu, antara lain pencemaran dan perusakan lingkungan (22 kasus), perampasan lahan (13 kasus), kriminalisasi warga penolak tambang (8 kasus), dan pemutusan hubungan kerja (2 kasus). Dari total jumlah konflik itu, terdapat 13 kasus yang melibatkan aparat militer maupun polisi. Begitu juga dengan intimidasi dan kriminalisasi di bidang pertambangan, sepanjang tahun 2020, dari rekaman JATAM terdapat 8 kasus kriminalisasi tambang yang menimbulkan korban kriminalisasi sebanyak 69 orang dan 6 diantaranya mengenai remaja dibawah umur yang menggunakan 12 pasal yang tersebar dalam empat (4) undang-undang mulai dari KUHP, UU Minerba lama No. 4 Tahun 2009 maupun UU Minerba baru No. 3 Tahun 2020, hingga UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011.

Dari 8 kasus kriminalisasi sepanjang tahun 2020 ini terdapat 4 kasus kriminalisasi terbesar yang menyebabkan 66 orang yang menjadi korban kriminalisasi, empat kasus tersebut adalah ; Kriminalisasi dalam kasus dan konflik masyarakat nelayan Kepulauan Sangkarang, Kodingareng, Sulawesi Selatan melawan rencana reklamasi Makassar New Port, Pelindo, tambang pasir laut dan Tambang asal Belanda, Boskalis. Kriminalisasi dalam kasus dan konflik buruh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Pulau Halmahera, Maluku Utara dan PT Virtue Dragon Nikel Industri, Kecamatan Morosi, Sulawesi Tenggara. Kriminalisasi dalam kasus dan konflik masyarakat penolak tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) di

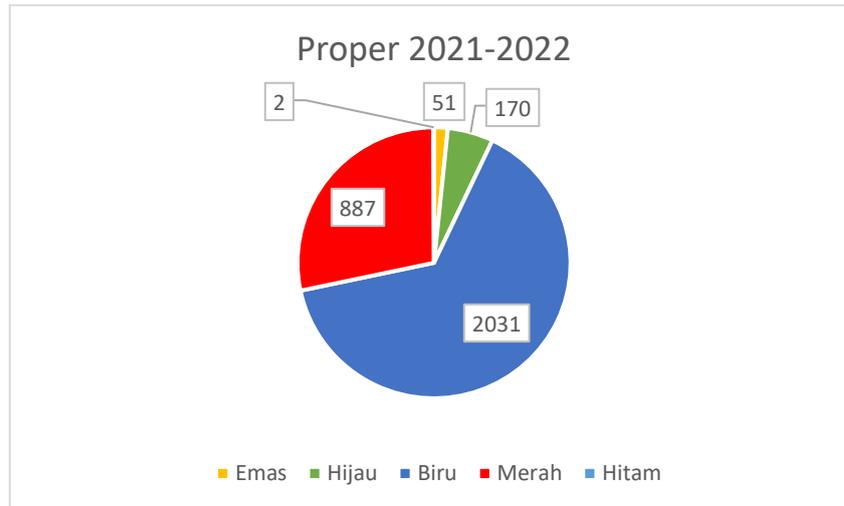
Banyuwangi, Jawa Timur. Kriminalisasi dalam kasus dan konflik masyarakat nelayan penolak tambang timah PT Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung. Jika dijumlahkan sepanjang 2014-2020 maka terdapat 269 korban kriminalisasi dan penyerangan melalui penggunaan 20 pasal dan 7 Undang-undang yang dilakukan oleh negara dan korporat melalui tangan aparat keamanan, ungkap Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum JATAM Nasional (Jamil et al, 2021).

Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban sosial atau CSR tertuang dalam undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang pertanggungjawaban badan hukum (UUPT) dan undang-undang pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas. Dengan berlakunya kebijakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan, diharapkan semua perusahaan khususnya perusahaan pada industri pertambangan dapat bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki guna menjadikan perusahaan yang tidak hanya fokus pada keuntungan semata, namun bisa menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar kepentingan perusahaan saja (Erawan, 2021).

Pemerintah juga membuat sebuah kebijakan berupa penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup atau juga disebut PROPER. Program ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah, secara spesifik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”) dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan PROPER didasarkan pada Permen LHK 1/2021, di mana Pasal 1 angka 1 Permen LHK 1/2021 menyebutkan: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup,

Dalam penilaiannya, Pemerintah akan menilai program lingkungan perusahaan kemudian menggolongkannya ke dalam warna-warna yang akan mempengaruhi reputasi atau citra perusahaan. Setidaknya, terdapat 5 warna yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: Peringkat Emas: Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan. Peringkat Hijau: Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi hasil penilaian tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) huruf b Permen LHK 1/2021. Peringkat Biru: Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat Merah: Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat Hitam: Untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.

Dari tingkatan warna di atas diketahui bahwa perusahaan yang mendapatkan peringkat emas, hijau, dan biru mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut taat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan bagi yang mendapatkan peringkat merah dan hitam menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak taat mengelola lingkungan hidup (Valerie, 2022).



Gambar 1.1 Grafik persebaran peringkat peserta pada PROPER 2021-2022

Sumber: proper.menlhk.go.id

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat pada tahun 2021-2022 tercatat 3.200 perusahaan yang menjadi peserta dalam penilaian PROPER, 3.141 perusahaan ditetapkan peringkat-nya; 32 perusahaan ditangguhkan penetapan peringkat-nya; dan 27 perusahaan tidak dapat ditetapkan peringkat karena sudah tidak beroperasi. Perusahaan yang mendapatkan peringkat Emas sejumlah 51 perusahaan. Perusahaan yang mendapatkan peringkat Hijau sebanyak 170 perusahaan. Perusahaan yang mendapatkan peringkat Biru sebanyak 2031 perusahaan. Perusahaan yang mendapatkan peringkat Merah sebanyak 887 perusahaan. Dan Perusahaan yang mendapatkan peringkat Hitam sebanyak 2 perusahaan. Berikut jika dinyatakan dalam bentuk grafik.

Diantara faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah *good corporate governance* yang diproksikan kedalam ukuran dewan komisaris dan komisaris independen. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka akan semakin meningkatkan pengendalian dalam perusahaan dan akan menekan manajemen dalam mengungkapkan pertanggungjawaban sosial. (Suhardjanto & Nugraheni, 2012). Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah dari seluruh komisaris yang terdapat pada organisasi perusahaan baik

itu komisaris yang berasal dari dalam perusahaan ataupun luar perusahaan (komisaris independen).

terdapat beberapa peneliti yang menyatakan bahwa hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan *Corporate social responsibility* memiliki hubungan yang signifikan, diantaranya adalah Mohammadi et al (2021); Thasya et al (2020); Herizona & Yuliana (2021); Sihombing, et al (2020); Prasetya & Sari (2022); Chen (2019); dan Afifah & Immanuela (2021) dikatakan apabila semakin banyak komposisi atau jumlah dewan komisaris dapat meningkatkan kinerja berupa *monitoring* dengan lebih maksimal sehingga diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan penungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan. Pernyataan diatas Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla et al (2022), dan Pratama & Wulandari (2017) yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sunarsih & Nurhikmah (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen mempunyai fungsi untuk menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya, seandainya pemimpin perusahaan hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham saja tentu hak tersebut akan membuat kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan terkesan hanya untuk memenuhi regulasi semata. Herizona & Yuliana (2021); Thasya et al (2020) dan Mohammadi et al (2021), penelitian yang menyatakan komisaris independent dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan tidak ada pengaruh antara komisaris independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh Salsabilla et al (2022), dan Komalasari & Anna (2013).

Berdasarkan uraian diatas, besarnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dibarengi oleh peningkatan kesadaran dewan perusahaan dalam melakukan kewajibannya guna tumbuh kembang secara berkelanjutan. Kemudian penambahan variabel profitabilitas yang dimaksudkan untuk memberikan suatu gagasan bahwa terdapat dugaan hubungan antara *Good*

Corporate Governance yang diproksikan kedalam ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diperkuat atau diperlemah. Dan juga peneliti melihat terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Oleh karna itu, Sumbangan pemikiran bagi akademisi guna dijadikan referensi dan perusahaan mengenai pentingnya *Good Corporate Governance*, profitabilitas serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah harapan peneliti untuk penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022).”** Diantara perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada populasi dan sampelnya serta penambahan variabel moderasi yang diproksikan dengan profitabilitas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan populasi penelitian pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022

Sektor ini diambil karena perusahaan pada sektor pertambangan sebagai salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam memberikan dampak negatif pada kerusakan alam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah;

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?

3. Apakah profitabilitas memoderasi ukuran dewan komisaris dalam mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
4. Apakah profitabilitas memoderasi komisaris independen dalam mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang dilakukanya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan,
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti adanya pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan,
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti adanya pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti adanya pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh ukuran komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Salah satu hal yang penting dari sebuah penelitian adalah bermanfaatnya penelitian tersebut, guna sebagai bahan dalam pengambilan sebuah keputusan setelah mendapat informasi dari penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk memperdalam penelitian selanjutnya dalam mengkaji pengaruh ukuran dewan komisaris dan komisaris independen terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi praktisi

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagai referensi perusahaan dalam pengambilan kebijakan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

Solihin (2009) mengatakan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengertian sebagai berikut : “*Corporate Social Responsibility is a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contributions of corporate resources. Achieving commercial success in ways that honor ethical values and respect people, communities, and the natural environment. The willingness of an organization to incorporate social and environmental consideration in its decision making and be accountable for the impacts of its decisions and activities on society and environment*”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan tiga dimensi inti dari *Corporate Social Responsibility*:

1. *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen, kontribusi, cara pengelolaan bisnis, dan pengambilan keputusan pada perusahaan.
2. Komitmen, kontribusi, pengelolaan bisnis, dan pengambilan keputusan perusahaan didasarkan pada akuntabilitas, mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, memenuhi tuntutan etis, legal dan professional.
3. Perusahaan memberikan dampak nyata pada pemangku kepentingan dan secara khusus pada masyarakat sekitar.

Sedangkan definisi *Corporate Social Responsibility* menurut *World Business Council on Sustainable Development* adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Definisi lain *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab

perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan *stakeholders* sehubungan dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 ayat 1. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan berkaitan dengan sumber daya alam, maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Di sisi lain juga, peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara yang mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam menjaga kelsetarian lingkungan dan sosial adalah dengan mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f.

Menurut Crowther & Aras (2008) prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dikelompokkan menjadi tiga meliputi *sustainability* (berkelanjutan), *accountability* (akuntabilitas), dan *transparency* (transparansi).

1. *Sustainability* (Berkelanjutan)

Berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam di masa mendatang. Penggunaan sumber daya alam saat ini dimanfaatkan secukupnya dan memperhitungkan untuk generasi masa depan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Merupakan tanggung jawab dan keterbukaan perusahaan atas segala aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas menjadi media perusahaan dalam membangun citra terhadap *stakeholders*.

3. *Transparency* (Transparansi)

Berkaitan dengan pelaporan aktivitas perusahaan untuk mengurangi kesalahpahaman informasi dan pertanggungjawaban. Keterbukaan perusahaan sangat penting bagi pihak eksternal.

Menurut Hadi (2011) mengatakan bahwa berbagai alasan yang mendasari perusahaan melakukan tanggung jawab sosial adalah :

1. Keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam memenuhi panggilan bahwa dirinya memiliki kepekaan terhadap masalah sosial ditengah masyarakat.
2. Meningkatkan nama baik perusahaan, simpati masyarakat, karyawan dan investor sehingga feedback secara ekonomi.
3. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat; meningkatkan respon positif norma dan nilai masyarakat
4. Sesuai dengan kehendak investor; membantu program pemerintah seperti konservasi, pelestarian budaya, peningkatan pendidikan, lapangan kerja dll.

2.1.2 **Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* pada dasarnya menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri melainkan wajib memberikan manfaat bagi pemegang kepentingan atau *stakeholdernya*. *Stakeholder* disini meliputi kreditor, *supplier*, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya. Istilah *stakeholder* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1963 oleh Stanford Research Institute dan didefinisikan sebagai kelompok yang dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan suatu organisasi (Harmoni, 2013). *Stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Teori *stakeholder* menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor yang

dapat disebut sebagai *shareholders* melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah yang dapat disebut sebagai *stakeholders*.

Sesuai dengan definisinya, *stakeholder* memegang peranan penting terhadap keberlangsungan perusahaan. Hal ini dikarenakan *stakeholder* memiliki kemampuan dalam mengendalikan sumber daya yang diperlukan dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* atau para pemangku kepentingan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan mereka, terutama *stakeholder* yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pelanggan dan pemilik (Hörisch et al., 2014).

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful *stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Handoko, 2014).

Yusuf (2017) menjabarkan bahwa teori *Stakeholder* merujuk pada sebuah argument yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab secara penuh pada seluruh *stakeholder*. Tujuan utama teori ini untuk menunjang peran manajer dalam memahami akan lingkungan *stakeholder*-nya dan melaksanakan penanganan secara efektif diantara lingkungan sekitar dengan perusahaan (Khasanah & Sucipto, 2020).

2.1.3 Teori Agency

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu *prinsipal* dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *prinsipal* serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *prinsipal* (Ichsan, 2013). Jika *prinsipal* dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh *prinsipal*.

Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah *prinsipal* untuk kepentingannya sendiri. Dalam *case* ini, pemerintah adalah *prinsipal* sedangkan perusahaan adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai *prinsipal* memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti *sales growth* atau *leverage*.

Sales growth yang semakin meningkat tentunya menggambarkan laba yang semakin meningkat pula sehingga manajer akan berfikir untuk memaksimalkan labanya dengan cara apapun. Begitu juga dengan *leverage*, kebijakan *leverage* yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh pendanaan dari eksternal demi kelangsungan operasional akan meningkatkan bunga namun memperkecil beban pajak karena semakin besar perlindungan pajak. Kedua hal tersebut menjadi

pertimbangan manajer dalam memutuskan kebijakan untuk memaksimalkan labanya.

Hal inilah yang menjadikan adanya konflik keagenan. Konflik keagenan yang terjadi antara agen dan *prinsipal* dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan pengungkapan *corporate governance* (Evianisa 2014). Menurut Forum for *Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) dalam Evianisa (2014) mengenai pengertian *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, komite audit, dan kualitas audit.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai:

“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *prinsipal* serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *prinsipal*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *prinsipal*. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *prinsipal* dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Setyawati, et al (2010), hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari perluasan dari satu individu pelaku ekonomi informasi menjadi dua individu. Salah satu individu ini menjadi agen untuk yang lain yang disebut *principal*. Agen membuat kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi *principal*, *principal* membuat kontrak untuk memberi imbalan pada *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* ke *agent*. Analoginya mungkin seperti antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan itu. Para pemilik disebut evaluator informasi dan agen-agen mereka disebut pengambil keputusan. Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika terdapat sebuah kontrak antara seseorang (atau beberapa orang), seorang *prinsipal* dan seseorang (atau beberapa orang) lain, seorang agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan *prinsipal* mencakup sebuah pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai *prinsipal* dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham.

Karena unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara *prinsipal* dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara *prinsipal* dan agen. Untuk memotivasi agen maka *prinsipal* merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu (1) Agen dan *prinsipal* memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun *prinsipal* memiliki kualitas dan

jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri, dan (2) Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Pada kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi, karena manajer berada didalam perusahaan sehingga manajer mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan, sedangkan *prinsipal* sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh sangat sedikit (Yushita, 2010). Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan agen dan *prinsipal* selalu dilandasi oleh asimetri informasi. Agen sebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan *prinsipal*. Di samping itu, karena verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan agen pun sangat sulit untuk diamati. Dengan demikian, membuka peluang agen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut *disfunctional behaviour*, dimana tindakan ini dapat merugikan *prinsipal*, baik memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun perekayasaan kinerja perusahaan.

Baik *prinsipal* maupun agen diasumsikan mementingkan diri sendiri yaitu, untuk memaksimalkan utilitas subjektif mereka, tetapi juga menyadari kepentingan umum mereka (Yushita, 2010.). Efeknya, perusahaan dipandang sebagai sebuah tim yang terdiri dari individu-individu yang anggotanya bertindak demi kepentingan sendiri tetapi menyadari bahwa nasib mereka tergantung sampai tingkat tertentu pada kemampuan tim untuk bertahan dalam kompetisinya dengan tim lain. Agen berusaha memaksimalkan fee kontraktual yang diterimanya tergantung pada tingkat upaya yang diperlukan. *Prinsipal* berusaha untuk memaksimalkan returns dari penggunaan sumber dayanya tergantung pada fee yang dibayarkan kepada agen.

Masalah keagenan muncul ketika *principal* kesulitan memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal* (Yushita, 2010.). Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen dan bukan pemilik yang menanggung risiko dengan bayaran tertentu. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari secara terus menerus untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan *principal*.

Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan *principal* sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Jensen & Meckling (2019) mendefinisikan:

“agency cost as the sum of (1) the monitoring expenditures by the principal; (2) the bonding expenditures by the agent; (3) the residual loss”.

Biaya keagenan didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Jensen & Meckling (2019) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan *principal*.

2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks & Minow, 2011). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003) yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999 (Kaihatu, 2006).

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Zarkasyi, 2008).

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini berfungsi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Dalam penerapan GCG dunia usaha sebagai pelaku pasar dalam menjalankan usahanya dengan sehat, efisien, dan transparan. Dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa maka harus melakukan kontrol sosial dengan memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah serta kegiatan produk atau jasa yang dihasilkan dunia usaha, melalui penyampaian pendapat secara objektif (Nasution, 2016).

2.1.5 Profitabilitas

Profit dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan elemen penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing dipasar. Setiap perusahaan mengharapkan profit yang maksimal. Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang oleh perusahaan. Menurut Sutrisno (2009) “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya. Profitabilitas menurut Harahap (2009) adalah “Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya”. Sedangkan menurut (Brigham & Houston, 2006) “Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada didalam perusahaan itu sendiri.

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio profitabilitas. menurut Brigham & Houston (2006) “Sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan efek – efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi. Rasio ini meliputi margin laba atas penjualan, rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba, tingkat pengembalian atas total aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas saham biasa”. Sedangkan Rasio profitabilitas menurut Weston & Copeland (2010) adalah mengukur

efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi.

Berdasarkan teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada didalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

Penjualan dan investasi yang besar sangat diperlukan dan mempengaruhi besarnya rasio profitabilitas semakin besar aktivitas penjualan dan investasi maka akan semakin besar pula rasio profitabilitasnya.

Secara umum ada empat jenis analisis utama yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas yakni terdiri dari, Menurut Kasmir (2008), yaitu:

1. *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut Riyanto & Perusahaan (2013) “*Net Profit Margin* adalah suatu rasio yang mengukur keuntungan netto per rupiah penjualan”. Dan juga Riyanto & Perusahaan (2013) mengatakan “*Net Profit Margin* adalah perbandingan antara *net operating income* dengan *net sales*. *Net Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rasio ini akan menggambarkan penghasilan bersih perusahaan berdasarkan total penjualan bersih.

$$\text{NPM} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

2. *Return On Assets* (ROA)

Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait

sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini.

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

3. *Return on Equity (ROE)*

Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan (income) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (net worth), sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha.

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{modal}}$$

4. *Earning per share (EPS)*

Merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan

$$\text{EPS} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{lembar saham yang beredar}}$$

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah dari seluruh komisaris yang terdapat pada organisasi perusahaan baik itu komisaris yang berasal dari dalam perusahaan ataupun luar perusahaan (komisaris independen) (Suhardjanto et al, 2012). Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Dewan komisaris terdiri atas komisaris independen yang dibantu oleh komite audit untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Undang- Undang No. 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris dalam perseroan terbuka minimal wajib mempunyai 2 (dua) orang anggota. Tentu saja komposisi dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran dan kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan keefektifan, kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan.

Dalam *agency theory* disebutkan bahwa terdapat biaya keagenan yang timbul sebagai akibat benturan kepentingan antara principal perusahaan dengan agent, dalam hal ini, dewan komisaris disebut sebagai wakil investor. Dengan hak dan wewenangnya maka akan mendorong manajemen dalam pengungkapan informasi-informasi perusahaan (Pasaribu et al (2015). Penelitian Hutapea & Malau (2018) menyebutkan ukuran dewan komisaris memiliki hubungan signifikan pada Corporate Social Responsibility Disclosure. Hal tersebut juga didukung Mohammadi et al (2021); Nazwir et al (2016); Yusran et al (2018); Restu et al (2017); dan Thasya et al (2020). Maka hipotesis pertama penelitian dirumuskan dibawah ini:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sunarsih & Nurhikmah (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen mempunyai fungsi untuk menempatkan kepentingan

perusahaan diatas kepentingan lainnya, seandainya pemimpin perusahaan hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham saja tentu hak tersebut akan membuat kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan terkesan hanya untuk memenuhi regulasi semata.

Asumsi dari teori keagenan adalah keistimewaan tertentu dewan komisaris dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memonitor, memberikan imbauan pada para manajer serta mempengaruhi performa perusahaan. Dan salah satu keistimewaan tersebut adalah dewan komisaris independen. Dewan ini dianggap sebagai salah satu instrumen dalam memonitor integritas manajemen yang kedepannya dapat mendorong keluasan informasi pada tanggung jawab sosialnya (Pasaribu et al (2015). Penelitian Restu et al (2017) menyebutkan independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan pada Corporate Social Responsibility Disclosure. Sejalan dengan penelitian Pasaribu et al (2015); Mohammadi et al (2021); dan Nazwir et al (2016). Maka hipotesis kedua penelitian dirumuskan dibawah ini:

H2: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2.3 Profitabilitas Mampu Memoderasi Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen Dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perseroan umumnya merupakan badan usaha yang diawasi dan dijalankan oleh orang yang terampil dan berkeahlian profesional agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Performa perusahaan menggambarkan keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan, hal tersebut dapat diketahui salah satunya dengan melihat tingkat profitabilitas. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukannya Good Corporate Governance. GCG didefinisikan sebagai program yang digunakan untuk mengontrol perusahaan, tujuannya meningkatkan nilai shareholder serta menaungi para stakeholder perusahaan seperti kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya.

Dalam penelitian Sarafina & Saifi (2017) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *Good Corporate Governance* (yang diprosikan kedalam ukuran dewan komisaris dan komite audit secara simultan) terhadap profitabilitas. Hubungan antara profitabilitas dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* dapat dijelaskan dengan dua perspektif. Perspektif pertama menyebutkan bahwa apabila keuntungan semakin tinggi maka pengeluaran informasi tanggung jawab sosial semakin banyak. Didasarkan pada laba yang tinggi, semakin banyak pula aktivitas tanggung jawab sosial yang dapat dijalankan. Sementara perspektif kedua adalah semakin rendah keuntungan yang diperoleh maka semakin banyak pula aktivitas tanggung jawab sosial yang dijalankan. Karena, perusahaan ingin menunjukkan motifnya dengan cara menunjukkan citra baiknya agar investor semakin percaya kepada perusahaan dalam hal menanamkan dananya (Leksono & Butar, 2018).

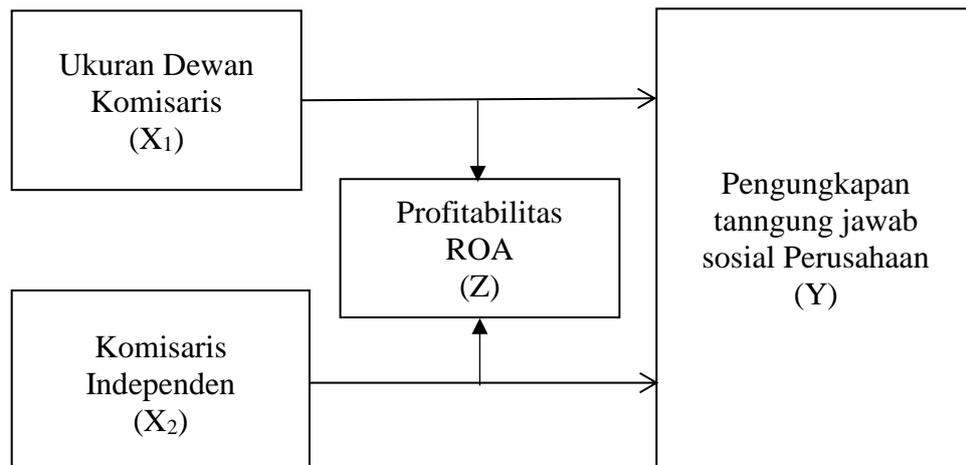
Sementara Penelitian Nazwir & Herawati (2016) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Dalam penelitianpenilitan lain seperti pada penelitian Kartini et al (2019); Sarafina & Saifi (2017); Leksono & Butar, (2018); Wiyuda & Pramono (2017); dan Nazwir et al (2016) menyebutkan bahwa profitabilita berpengaruh signifikan pada Corporate Social Responsibility Disclosure. Maka hipotesis dua penelitian dirumuskan dibawah ini:

H3a: Return On Asset mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

H3b: Return On Asset mampu memoderasi hubungan antara Komisaris Independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

2.3 Kerangka Penelitian

Secara grafis, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat di dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mohammadi et al (2021)	<i>The impact of board and audit committee characteristics on corporate social responsibility: evidence from the Iranian stock exchange</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap CSR; independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap CSR;
2.	Thasya et al (2020)	Pengaruh good corporate governance terhadap corporate social responsibility pada perusahaan sub sektor transportasi	hasil pengujian statistik secara parsial membuktikan bahwa Komite Audit dan Kepemilikan Institusional secara signifikan berpengaruh negatif terhadap CSR; Dewan Komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CSR; serta Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap CSR
3.	Herizona & Yuliana (2021)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure	Hasil penelitian didapatkan bahwa secara parsial variabel ukuran dewan komisaris dan independensi dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan. Sementara

		dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi	sercara simultan variabel yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan. Pada uji moderasi return on asset didapatkan hasil bawah variabel tersebut tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sedangkan pada uji moderasi return on equity didapatkan hasil bahwa variabel tersebut mampu memoderasi hubungan variabel ukuran dewan komisaris dengan corporate social responsibility disclosure.
4.	Chen (2019)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Asing Terhadap Luas Pengungkapan Csr	Hasil penelitian menemukan bahwa Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR sedangkan Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR
5.	Pratama & Wulandari (2017)	Pengaruh Profitabilitas, Jumlah Dewan Komisaris Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
6.	Salsabilla et al (2022)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Perusahaan Bumh	Hasil pengujian disimpulkan bahwa <i>ERM Disclosure</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan bertolak belakang dengan <i>IC Disclosure</i> yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
7.	Komalasari & Anna (2013)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Pada Industri Perbankan yang Listing di BEI Periode 2008-2011	Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, sedangkan komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa populasi sebagai wilayah secara umum yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini ialah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian sampel dilakukan dengan cara menggunakan data dari populasi penelitian yakni seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling menurut sugiyono (2019) ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan.

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun penelitian periode 2019-2022.
2. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun penelitian periode 2019-2022.

3. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berturut-turut selama tahun penelitian periode 2019-2022.
4. Perusahaan pertambangan yang menggunakan indikator GRI dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berturut-turut selama tahun penelitian periode 2019-2022.

Tabel 3.1 Hasil pemelihan sampel

No	Kretesia Pemilihan Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2019-2022.	32
2.	Perusahaan pertambangan yang delisting periode 2019-2022.	(1)
3.	Perusahaan pertambangan yang tidak mempublikasikan <i>Sustainability Report</i> dan tidak menggunakan indikator GRI periode 2019-2022	(13)
4.	Sampel yang digunakan	18
5.	Total Sampel selama 4 tahun	72

3.3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sunyoto (2013) menjelaskan data sekunder sebagai data yang berasal dari catatan perusahaan yang telah ada dan dari berbagai sumber lain. Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pertambangan pada tahun 2019-2022 yang diperoleh dari website *idx.co.id* dan masing-masing website perusahaan. Pengumpulan data dari beberapa perusahaan dengan rentang waktu dari tahun 2019-2022.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjabar dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Keterangan
Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan (Leksono & Butar, 2018)	UDK = Jumlah Dewan Komisaris	Rasio
Komisaris Independen	Proporsi Komisaris independen dalam dewan komisaris (Hutapea dan Malau, 2018)	$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Pengeluaran informasi yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan	$CSR D = \frac{\text{Jumlah Item yang diungkapkan}}{91 \text{ Item GRI}} \times 100\%$	Rasio

	(Restu et al., 2017)		
Profitabilitas (ROA)	Rasio yang mengukur laba perusahaan dibanding dengan total aset (Kartini, et al, 2019)	ROA= $\frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	Rasio

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan langsung dengan pengumpulan data dan ukuran-ukuran pemusatan data serta penyajian hasil ukuran pemusatan data tersebut. Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran umum mengenai variabel dependen serta variabel independen. Ukuran pemusatan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.4 Uji Persyaratan Analisis Data

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu terdiri uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi terdistribusi secara normal atau tidak maksudnya adalah apakah dalam regresi variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak Sugiyono (2019). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal, karena test statistik yang di dihasilkan valid. untuk menguji normalitas dapat melalui cara kolmogrow smirnow test (uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran p-plot.

Untuk uji kolmogorov smirnov yaitu jika nilai hasil uji K-S > dibandingkan nilai signifikan 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya uji normalitas. Lain halnya dengan melalui pola penyebaran p-plot dan grafik histogram yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independennya. Melalui bantuan software SPSS, Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan VIF (variance Inflation Factors) dan nilai tolerance (Sugiyono, 2019).

3. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau di sebut homoskedasitas. Heteroskedasitas di tandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedasitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas (Sugiyono, 2019).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016). Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menunjukkan korelasi anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau ruang (Ajija et al, 2011). Gejala autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji Durbin Watson Test dengan menentukan nilai durbin watosn (DW). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara

serempak pada saat yang bersamaan. Model regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana periodenya lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang didapatkan dari wibesite selanjutnya diolah dan dilakukan analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sebuah metode untuk menentukan hasil penelitian dan kemudian dideskripsikan dari hasil penelitian tersebut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z_1 + \beta_5 Z_2 + \beta_6 X_1 Z_1 + \beta_7 X_2 Z_1 + \beta_8 X_3 Z_1 + \epsilon \dots \dots \dots$$

Keterangan:

Y = Corporate Social Responsibility Disclosure

α = Konstanta

$\beta_1 X_1 X_2$ = UDK dan IDK

$\beta_2 Z_1$ = ROA

$\beta_3 X_1 Z_1 X_2 Z_1$ = Interaksi antara variabel UDK dan IDK dengan ROA

ϵ = Error term

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Uji yang dilakukan adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan tingkat signifikansi dimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Jika tingkat 32

signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (Ghozali, 2013).

3.6.2 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian MRA dimaksudkan untuk membuktikan apakah model regresi yang digunakan diperkuat atau diperlemah oleh variabel interaksi. Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui hubungan ukuran perusahaan dengan zakat dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh individual dari variabel-variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya. Dengan melakukan pengujian ini nilai-nilai statistik setiap variabel bebas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pada perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen yang dalam hal ini terdapat 2 variabel, yaitu ukuran dewan komisaris dan komisaris independen dengan variabel dependen yaitu, tanggung jawab sosial perusahaan dan juga ditambahkan variabel moderasi yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, disini profitabilitas yang merupakan variabel moderasi tersebut diproksikan kedalam *Return On Assets* (ROA). Kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Variabel Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipengaruhi dengan baik oleh jumlah dewan komisaris di suatu perusahaan dengan anggapan semakin banyak kuantitas dewan komisaris di suatu perusahaan maka hal tersebut memicu kegiatan monitoring yang lebih baik dan harapan dari kegiatan monitoring dapat meningkatkan tanggung jawab sosial yang dilakukan. Sejalan dengan teori *Good Corporate Governance* (GCG) yang memastikan manajemen dalam perusahaan berjalan dengan baik, lebih terarah dan terkendali.
2. Variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan Asumsi dari teori keagenan yang mengungkapkan keistimewaan tertentu dewan komisaris dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memonitor, memberikan imbauan pada para manajer serta mempengaruhi performa perusahaan. Dewan komisaris independen dianggap sebagai salah satu instrumen dalam memonitor integritas manajemen yang kedepannya dapat

mendorong keluasan informasi pada tanggung jawab sosialnya (Pasaribu et al 2015). Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dikarenakan batas minimum dewan komisaris independen hanya sebesar 30%, sehingga pengaruh yang diberikan oleh dewan komisaris independen belum cukup untuk mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Variabel moderasi yaitu profitabilitas yang diproksikan sebagai *Return On Assets* (ROA) tidak dapat memoderasi variabel independen, dalam hal ini ukuran dewan komisaris dan komisaris independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini membuktikan, bahwa dengan adanya peningkatan atau penurunan laba yang terjadi karena efektivitas pengelolaan aset tidak mendorong dewan komisaris perusahaan dalam mengungkapan tanggung jawab sosialnya. Dan hal ini juga membuktikan bahwasannya perusahaan kini sadar akan pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial tanpa harus memperhatikan keterangan aset serta laba yang terdapat pada perusahaan tersebut. Pada dasarnya pula, kegiatan CSR memiliki banyak biaya yang diperlukan sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat memangkas pendapatan suatu perusahaan (Boshnak, 2022). Dan pada kasus dewan komisaris independen, Hal tersebut bisa terjadi diakibatkan karena dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota direksi lainnya, pemegang saham pengendali serta bebas dari bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan tersebut, pengaruh ukuran dewan komisaris dan komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain bahwa terdapat variabel ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan

variabel dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk variabel profitabilitas yang diharapkan bisa memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, ROA tidak dapat memoderasi hubungan antara ukuran dewan komisaris dan komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

5.2 Keterbatasan penelitian

Riset yang dilakukan mendapatkan beberapa keterbatasan yaitu diantaranya:

1. Dalam penelitian ini banyak dari perusahaan sub sektor pertambangan yang tidak mengungkapkan laporan *Sustainability Report* menggunakan metode yang peneliti lakukan yaitu menggunakan standar GRI yang berjumlah 91 item , yang mengakibatkan sulitnya data untuk diperoleh.
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen dan keterbatasan kemampuannya dalam menjelaskan variabel dependen karena penelitian ini hanya mempunyai nilai R square sebesar 0,125 atau 12% dan sisanya sebesar 88% dijelaskan oleh sebab lain yaitu dapat mempengaruhi pengungkapan CSR
3. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja sebagai sampel, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada jenis perusahaan lain seperti sektor batubara, logam, mineral dan lainnya. Dan periode tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya berkisar 4 tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2022

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan penjelasan dari penelitian ini, berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah periode untuk menambah jumlah sampel. Hal tersebut karena penerapan CSR dilakukan secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama.
2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya dapat ditambahkan variabel lain, sehingga dapat lebih menjelaskan hubungan variabel independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
3. Dalam penelitian yang akan datang, peneliti berharap agar menggunakan standar pengukuran CSR yang berbeda dan memilih item yang relevan untuk diterapkan di Indonesia, sehingga pengukuran laporan CSR perusahaan Indonesia akan lebih akurat dan keragaman penelitian akan dihasilkan.

5.4 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan implikasi bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Perusahaan

Perusahaan-perusahaan pada sub sektor pertambangan diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja tetapi juga harus mempehatikan aspek lingkungan dan sosial sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya, diharapkan perusahaan yang berada pada sektor pertambangan lebih memperhatikan peraturan pemerintah terkait kewajiban sosial perusahaan seperti undang-undang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007, POJK No. 51/POJK.03/2017.

2. Investor

Bagi investor, diharapkan juga dapat memperhatikan masalah keberlanjutan dalam mempertimbangkan arah investasinya karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya berfokus pada laba, tapi juga memperhatikan masalah lingkungan dan sosial sehingga berkaitan dengan kinerja keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, R. N., & Immanuela, I. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *JRMA (Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi)*, 9(2), 109–123.
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). Cara cerdas menguasai Eviews. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Boshnak, H. A. (2022). Determinants of corporate social and environmental voluntary disclosure in Saudi listed firms. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3–4), 667–692. <https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2020-0129>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). Dasar-dasar Manajemen Keuangan, edisi kesepuluh. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Chen, M. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Asing Terhadap Luas Pengungkapan Csr. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 10(2), 141–158.
- Crowther, D., & Aras, G. (2008). *Corporate social responsibility*. Bookboon.
- Erawan, E. R. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS. In aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 19 (p. 113).
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta. Edisi.
- Handoko, Y. (2014). Implementasi social and environmental disclosure dalam perspektif teoritis. *Jurnal Jibeka*, 8(2), 74.
- Harahap, S. S. (2009). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan Edisi Ke satu. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Harmoni, A. (2013). Stakeholder-based analysis of sustainability report: a case study on mining companies in Indonesia. *International Conference on Eurasian Economies*, 40, 204–210.
- Herizona, B. S., & Yuliana, I. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Dan Komite Audit Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(1), 108–128.
- Hörisch, J., Freeman, R. E., & Schaltegger, S. (2014). *Applying Stakeholder Theory In Sustainability Management: Links, Similarities, Dissimilarities, And A Conceptual Framework*. *Organization & Environment*, 27(4), 328–346.
- Ichsan, R. (2013). Teori Keagenan (Agency Theory). *Islam, Ekonomi, Indonesia*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77–132). Gower.

- Kaen, F. (2003). *A blueprint for Corporate Governance: Strategy, accountability, and the preservation of shareholder value*. Amacom.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Kasmir, B. D. L. K. L. (2008). *Jakarta: PT Raja Grafindo*. Persada.
- Khasanah, I. D., & Sucipto, A. (2020). Pengaruh corporate social responsibility (csr) dan good corporate governance (gcg) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 14–28.
- Komalasari, D., & Anna, Y. D. (2013). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Pada Industri Perbankan yang Listing di BEI Periode 2008-2011. *Jurnal Akuntansi*.
- Leksono, A. A., & Butar, S. B. (2018). The Influence of Good Corporate Governance and Company Characteristics on Disclosure of Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Accounting*, 16(1), 1–18.
- Manurung, K. A. (2020). Pengaruh Praktek Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa *Efek Indonesia (Bei)*.
- Mohammadi, S., Saeidi, H., & Naghshbandi, N. (2021). *The Impact Of Board And Audit Committee Characteristics On Corporate Social Responsibility: Evidence From The Iranian Stock Exchange*. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 70(8), 2207–2236.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2011). *Corporate governance*. John Wiley & Sons.
- Muhammad Jamil, & Merah Johansyah. (2021). 2020 Adalah Tahun Panen Ijon Politik Tambang, Kriminalisasi hingga Berujung Bencana. *Jatam.Org*. <https://www.jatam.org/2020-adalah-tahun-panen-ijon-politik-tambang-kriminalisasi-hingga-berujung-bencana/>
- Nanda, U. L., & Rismayani, G. (2019). Pengaruh Gender Diversity, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1).
- Nasution, N. R. (2016). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Kaitannya dengan Keefektifan Laba Perusahaan pada RS. GL Tobing PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Deli Serdang.
- Nazwir, I., & Herawati, H. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam Sustainability Report Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 8(1).
- Pasaribu, R. B. F., Kowanda, D., & Kurniawan, D. (2015). Pengaruh earning management dan mekanisme good corporate governance terhadap

- pengungkapan corporate social responsibility pada emiten manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 10(2), 97–121.
- Prasetya, W., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen sebagai Moderator Hubungan Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3391–3399.
- Pratama, D. A., & Wulandari, P. P. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Jumlah Dewan Komisaris Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–11.
- Raja Eben Lumbanrau. (2021). Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan’, Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang. Bbc.Comindonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>
- Restu, M., Yuliandari, W. S., & Nurbaiti, A. (2017). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *EProceedings of Management*, 4(3).
- Riyanto, B., & Perusahaan, D.-D. P. (2013). Edisi keempat. *Yogyakarta: BPFE Yogyakarta*.
- Salsabilla, A. I., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan BUMN. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 394–406.
- Setyawati, O., Engenhorst, M., Bartels, M., Daneker, V., Wittzack, S., Woit, T., Köhler, F., & Hillmer, H. (2010). *Characterization Of Dry Etching Of Tio2/Sio2 Distributed Bragg Reflectors For Tunable Optical Sensor Arrays. Journal of Micro/Nanolithography, MEMS and MOEMS*, 9(4), 41110.
- Sihombing, T. S. B., Banjarnahor, H., Alfionita, W., & Auran, D. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 8(2), 59–68.
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility: from charity to sustainability*. Penerbit Salemba.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suhardjanto, D., & Nugraheni, S. (2012). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 162–175.
- Sunarsih, U., & Nurhikmah, N. (2017). Determinant of The Corporate Social Responsibility Disclosure. *Etikonomi*, 16(2), 161–172.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi penelitian akuntansi*.
- Sutrisno, H. (2009). *Manajemen keuangan teori, konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Ekonosia.

- Thasya, N., Lisah, L., Angeline, A., Gozal, N., Veronica, V., & Rahmi, N. U. (2020). Pengaruh good corporate governance terhadap corporate social responsibility pada perusahaan sub sektor transportasi. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 69–82.
- Valerie Augustine Budianto. (2022). *Yuk Kenali PROPER dan Bagaimana Proses Penilaian PROPER*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/yuk-kenali-proper-dan-bagaimana-proses-penilaian-proper-lt623ae572a9d76/#_ftnref2
- Weston, J. F., & Copeland, T. E. (2010). Manajemen Keuangan, Alih Bahasa oleh A. Jaka Wasana Dan Kibrandoko, Edisi Revisi, Jilid, 1.
- Wiyuda, A., & Pramono, H. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- Yushita, A. N. (2010). Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol. Viii. No. 1– Tahun 2010 Hal. 53-62. 8, 53–62.
- Yusran, I. A., Kristanti, F. T., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Indikator Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 20112016). *EProceedings of Management*, 5(1).
- Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*. Prenada Media.
- Zarkasyi, W. (2008). Good corporate governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya. *Bandung: Alfabeta*, 5.